

ABSTRAK

Intan Purnamasari 12103183052, *Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Eks Islamic State Iraq and Suriah dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah*. Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, pembimbing : Dr. Hj. Nur Fadhilah, M.H.

Kata Kunci: *fiqih siyasah, hukum positif, kewarganegaraan, warga negara Indonesia eks ISIS*

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya WNI yang ikut serta dalam gerakan ISIS hingga tergabung sebagai anggota tentara aktif. Namun, beberapa WNI tersebut pada akhirnya melepaskan diri dari ISIS dan kembali ke Indonesia. Hal ini menimbulkan kontroversi, apakah WNI tersebut tetap berkewarganegaraan Indonesia atau sudah kehilangan kewarganegaraan sebagai WNI. Kewarganegaraan WNI eks ISIS menjadi isu yang menarik untuk dikaji menggunakan hukum positif dan fiqih siyasah.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kewarganegaraan WNI eks ISIS? 2) Bagaimana kewarganegaraan WNI eks ISIS dalam perspektif hukum positif? 3) Bagaimana kewarganegaraan WNI eks ISIS dalam perspektif fiqih siyasah? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan kewarganegaraan WNI eks ISIS, 2) Menganalisis kewarganegaraan WNI eks ISIS dalam perspektif hukum positif, 3) Menganalisis kewarganegaraan WNI eks ISIS dalam perspektif fiqih siyasah.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue-approach). Pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) WNI eks ISIS ini tetap berkewarganegaraan Indonesia selama masih bisa memberikan bukti-bukti yang kongkrit kepada negara dan Jika WNI eks ISIS dipulangkan pemerintah perlu adanya upaya Deradikalisasi hal ini menjadi upaya terbaik untuk mengendalikan ideologi mereka sesuai dengan sesuai dengan ideology Pancasila. Dengan penanganan radikalisme di Indonesia adalah tugas dari Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT), mengingat bahwa radikalisme adalah

suatu paham dan pola pikir maka upaya penanganan ini perlu adanya program pendidikan deradikalisasi, hal ini bertujuan untuk membentuk pola pikir seseorang supaya bisa menerima keragaman di Indonesia. 2) Dalam perspektif hukum positif, hilangnya kewarganegaraan yang berorientasi pada perlindungan HAM dikatakan sebagai tindakan pada ide individualisasi pidana, dan yang bisa memutuskan hilang atau tidaknya kewarganegaraan hanya pengadilan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 27 UU HAM setiap WNI berhak kembali ke Indonesia. 3) Dalam perspektif fiqh siyasah, WNI eks ISIS tetap berkewarganegaraan Indonesia selaras dengan kaidah fiqh Kebijakan Pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”. Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah dengan sistem apapun harus berdasarkan kepentingan untuk semua lapisan masyarakat.

ABSTRACT

Intan Purnamasari 12103183052, *Citizenship of Indonesian Citizens Ex-ISIS in the Perspective of Positive Law and Siyasa Fiqh*. Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Legal Sciences, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, supervisor: Dr. Hj. Nur Fadhilah, M.H.

Keywords: siyasah fiqh, positive law, citizenship, former ISIS Indonesian citizens

This research is motivated by the existence of Indonesian citizens who participated in the ISIS movement until they joined as active army members. However, some of these Indonesian citizens eventually broke away from ISIS and returned to Indonesia. This caused controversy, whether the Indonesian citizen remained Indonesian citizenship or had lost his citizenship as an Indonesian citizen. The citizenship of ex-ISIS Indonesian citizens is an interesting issue to be studied using positive law and fiqh siyasah.

The formulation of the problem in this study is: 1) What is the citizenship of ex-ISIS Indonesian citizens? 2) How is the citizenship of ex-ISIS citizens in a positive legal perspective? 3) How is the citizenship of ex-ISIS Indonesian citizens in the perspective of fiqh siyasah? This research aims to: 1) Describe the citizenship of ex-ISIS Indonesian citizens, 2) Analyze the citizenship of ex-ISIS Indonesian citizens from a positive legal perspective, 3) Analyze the citizenship of ex-ISIS Indonesian citizens from the perspective of fiqh siyasah.

This research is normative juridical research with a statute-approach to legislation. Data collection uses document studies. Data analysis was carried out on primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of the study show that: 1) These ex-ISIS Indonesian citizens remain Indonesian citizens as long as they can still provide concrete evidence to the state and if the ex-ISIS Indonesian citizens are repatriated, the government needs to have a Deradicalization effort, this is the best effort to control their ideology in accordance with the Pancasila ideology. With the handling of radicalism in Indonesia is the task of the National Agency for

Handling Terrorism (BNPT), considering that radicalism is an understanding and mindset, efforts to handle this need a deradicalization education program, this aims to form a person's mindset so that they can accept diversity in Indonesia. 2) In a positive legal perspective, the loss of citizenship oriented to the protection of human rights is said to be an act on the idea of criminal individualization, and the only thing that can decide whether or not citizenship is lost is the courts. As explained in article 27 of the Human Rights Law, every Indonesian citizen has the right to return to Indonesia. 3) From the perspective of fiqh siyasah, Indonesian ex-ISIS citizens remain Indonesian citizens in line with the fiqh rules of the Policy of Leaders (Imam) towards their people must be associated with benefits". This rule provides the basis for a government with any system that must be based on the interests of all levels of society.